

KOMUNIKASI DALAM PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DIMASA PANDEMI (Studi Kasus Pada Kebijakan Vaksin Covid-19)

Chontina Siahaan^{1*}, Donal Adrian²

¹*Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Jakarta*

²*Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako*

*Email: chontinasiahaan58@gmail.com

ABSTRACT

The government's strategy in preventing the spread of COVID-19 is to implement policies regarding the injection of the corona 19 vaccine to the entire community. This study aims to analyze and describe the communication process in public perceptions of the COVID-19 vaccine policy by the Palu City government. The research method used qualitative. Data collection techniques, namely observation and in-depth interview. The results showed that the government policy regarding the COVID-19 vaccine is a stimulus that can generate perceptions from the public as a target. Based on the perception that the people in Palu City, Central Sulawesi, responded well to the policy of injecting the COVID-19 vaccine for a healthy and prosperous Indonesia.

Keywords: Policy; COVID-19 Vaccine; Perception

ABSTRAK

Strategi pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ialah dengan menerapkan kebijakan tentang penyuntikan vaksin corona 19 kepada seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses komunikasi dalam persepsi masyarakat mengenai kebijakan vaksin COVID-19 oleh pemerintah Kota Palu. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang vaksin COVID-19 merupakan stimulus yang dapat menghasilkan persepsi dari masyarakat sebagai target sasaran. Berdasarkan persepsinya bahwa masyarakat di Kota Palu, Sulawesi Tengah merespon dengan baik terkait dengan kebijakan penyuntikan vaksin COVID-19 demi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Kata Kunci: Kebijakan; Vaksin COVID-19; Persepsi

Submisi: 9 Agustus 2021

Pendahuluan

Kesehatan merupakan kondisi di mana tubuh manusia merasa sehat dan mampu mempengaruhi dengan baik kondisi rohani sehingga segala aktivitas yang dilakukan dapat dikerjakan secara maksimal serta membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sehat bisa didapatkan dengan cara yang sederhana mulai dari berolahraga, makanan yang bervitamin, minum air putih, membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang positif,

membantu orang lain dan sebagainya. Sehat merupakan faktor utama yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup secara produktif dengan menghasilkan karya-karya yang cemerlang. Siapapun berhak untuk hidup sehat mulai dari masyarakat dari kalangan menengah ke bawah hingga pada masyarakat dengan level yang sangat baik secara finansial.

Masyarakat yang sehat adalah mereka yang mampu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Namun

sebaliknya, banyak juga ditemukan masyarakat dengan kondisi tubuh yang sakit dan tidak mampu beraktivitas di luar rumah. Selain, tubuhnya yang lemah, orang tersebut diduga bisa menularkan penyakit yang diderita kepada orang lain, misalnya pada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Virus ini berasal dari China yang dikenal sebagai Covid-19. Tidak hanya di China, pandemi tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, (Sari & Sriwidodo, 2020: 204)

Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi (Kemenkes RI, 2020).

Virus ini sangat mudah menyerang tubuh manusia dan bisa mengakibatkan manusia menderita sakit hingga pada kematian. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*droplet*), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Tosepu et al., 2020).

Gejala-gejala yang dialami saat tertular virus corona, biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap.

Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapa pun dapat terinfeksi Covid-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan/atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas/sesak napas, nyeri/tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis, (Susilo, 2020: 45)

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dikarenakan jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi terus meningkat, (Putri, 2020:705). Hingga saat ini, berdasarkan data secara nasional tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia yaitu pasien positif 977.474, sembuh 791.059 dan 27.664 meninggal, (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Selanjutnya pada tingkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 23 Januari 2021 bahwa konfirmasi pasien positif 6411, sembuh 4071 dan meninggal 166 orang. Khusus untuk wilayah Kota Palu bahwa pasien yang terkonfirmasi positif yaitu 1930 orang, (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021).

Pemerintah melakukan upaya dalam mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Langkah-langkah yang diambil umumnya ditujukan kepada setiap individu agar sadar bahwa penyebaran COVID-19 merupakan masalah yang sangat kompleks karena dapat menghambat hampir seluruh aktivitas manusia yang umumnya lebih banyak melakukan interaksi dengan manusia lainnya dan tentunya mempermudah penyebaran virus, (Murni, dkk. 2020:65)

Untuk menangani pandemi Covid-19, banyak pemimpin sebagai pemerintah menghimbau warganya untuk melakukan isolasi dalam mencegah penularan virus penyakit ini, (Mona, 2020:117). Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, maka kebijakan baru berupa social distancing diterapkan, (Hidayat, dkk. 2020:258). *Social distancing* merupakan usaha seseorang untuk tidak berhubungan dalam jangkauan yang rapat atau menjauhi keramaian orang (Eikenberry et al., 2020).

Berbagai kebijakan juga dilakukan seperti pembatasan sosial berskala besar termasuk pembatasan sekolah, tempat kerja, tempat peribadatan, tempat umum dan transportasi; pemberian bantuan sosial; pemberian insentif bagi tenaga kesehatan; kebijakan masker untuk semua; dan kebijakan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat yang terus digaungkan selagi menanti vaksin, (Yuningsih, 2020:13).

Penerapan penyuntikan vaksin COVID-19 merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Namun karena begitu kuatnya efek dari media yang mengabarkan bahwa vaksin COVID-19 berbahaya untuk tubuh manusia, maka banyak masyarakat di Indonesia dengan segala persepsi yang mereka miliki, menentang kebijakan penyuntikan vaksin tersebut. Sehingga dalam proses penerapan aturan yang ada mengalami kendala. Tetapi terdapat juga sebagian yang setuju dengan kebijakan pemerintah karena telah mengetahui manfaat dari vaksin corona.

Berdasarkan tulisan dari (Yuningsih, 2020:16) bahwa pada Juni 2020, telah dilakukan uji klinik fase I dan II pada 743 sukarelawan di China. Hasilnya, tidak ada efek buruk yang ditimbulkan dan CoronaVac dapat memproduksi respons kekebalan tubuh pada sukarelawan. Uji klinik CoronaVac tidak hanya dilaksanakan di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti Bangladesh, Turki, Cile dan Brasil. Di

Brasil, uji klinik fase III melibatkan 9.000 sukarelawan (Kompas, 13 Agustus 2020)

Uji klinik fase III merupakan pengujian tahap akhir sebelumnya akhirnya calon vaksin diregistrasi di negara asal dan memperoleh izin untuk diedarkan di pasaran. Terkait hal ini, Badan POM telah memiliki peraturan tentang persetujuan vaksin impor untuk diedarkan di Indonesia seperti Peraturan Badan POM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Persetujuan ini sebagai salah satu bentuk pengawasan premarket yang dilakukan oleh Badan POM. Ketika sudah diedarkan, Badan POM berwenang melakukan pengawasan postmarket agar produk yang dipasarkan terjamin keamanan, khasiat dan mutunya sebagaimana yang diajukan pada saat registrasi di Badan POM. Dengan pengawasan *premarket* dan *postmarket* tersebut, masyarakat Indonesia akan terlindungi dari vaksin ilegal, vaksin palsu, serta vaksin rusak, (Yuningsih, 2020:16).

Komunikasi

Rakhmat (Awanis & Adiyanti, 2020: 136) menjelaskan bahwa komunikasi dapat efektif apabila penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya seperti yang dimaksudkan pengirimnya. Collin Cherry (1964) dalam (Permadi, 2018: 525) mendefinisikan komunikasi sebagai “usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Psikologi mengarahkan perhatiannya pada perilaku manusia mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut.

Komunikasi yang membahas tentang persepsi tentunya juga akan mengkaji dalam hal psikologi. Pada dasarnya bahwa menurut Fisher (Permadi, 2018: 525) psikologi melihat pada perilaku individu komunikasi. Fisher menyebut empat ciri psikologi pada komunikasi, yaitu: (1) Penerimaan stimuli secara indrawi, (2) Proses yang mengantari stimuli dan respon, (3) Prediksi respon dan (4) Peneguhan respon.

Persepsi

Persepsi merupakan proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilih dan dipilih, kemudian diatur dan kemudian diinterpretasikan (Prasetijo, 2005:67). Selanjutnya dijelaskan bahwa persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Mulyana, 2007:179).

Menurut (Rakhmat, 2012) dalam (Awanis & Adiyanti, 2020: 137) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menampilkan informasi dan menafsirkan pesan. Pada dasarnya bahwa persepsi kental dengan ekspresi dalam menanggapi segala rangsangan atau stimulus dari luar individu dan kemudian memberikan makna tertentu dari stimulus tersebut.

Menurut (Permadi, dkk. 2018: 522), persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya yang diperoleh dengan penginderaan, sehingga memunculkan interpretasi dari stimulus yang mengenainya, sehingga memunculkan makna tentang objek tersebut. Pada intinya persepsi dimulai dari stimuli dan kemudian diinterpretasikan. Input sensorik yang diterima oleh manusia merupakan data awal (mentah) yang kemudian diproses dan diolah kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Wijaya (Thoha, 1983:142) adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan, yaitu warna, bunyi, sinar, dapat juga ekonomi, sosial, maupun politik.

2. Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya.
3. Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri, kadang seseorang menganggap dirinya selalu baik sedang orang lain selalu kurang baik atau sebaliknya.
4. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan.
5. Faktor pengalaman masa lampau, pengalaman dan latar belakang kehidupan seseorang pada waktu kecil akan menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi perilakunya.

Alex Sobur (2003:446) membagi proses persepsi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
3. Reaksi, yaitu tingkah laku setelah berlangsung proses seleksi dan interpretasi.

Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka, diperlukan sebuah kebijakan untuk mangaturnya. Kebijakan ini merupakan aturan yang menyangkut orang banyak. Kebijakan adalah sebuah keputusan politik yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik, (Afifah, 2016: 335)

Menurut Federick sebagaimana dikutip Agustino (2014:7) mendefinisikan "Kebijakan sebagai serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Kemudian menurut Marzali (2012:19) mengemukakan “Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran (kelompok target)”.

Konseptualisasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam hal ini kasus tersebut berkaitan dengan penyebaran COVID-19 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penyuntikan vaksin. Kebijakan tersebut dipersepsi oleh masyarakat di Kota Palu sebagai lokasi penelitian. Subjek penelitian terbagi atas 12 orang mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga pada kalangan menengah ke atas. Objek penelitian berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang kebijakan pemerintah penyuntikan vaksin COVID-19.

Penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: 1) Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai “fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan”. Fenomena sosial berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksin COVID-19, 2) Metode Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu “pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban itu”. Sedangkan Analisis data melalui tiga tahapan: Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, (Saldana, 2016)

Hasil Penelitian

Kota Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah ini sebagai jalur pembuka utama dalam proses transportasi baik darat, laut dan udara. Masyarakat yang ingin bepergian ataupun berkunjung ke Kota Palu tentunya mendapatkan kemudahan dengan jalur transportasi yang dimiliki namun dibalik kemudahan tersebut, dimasa pandemic seperti ini tentunya bisa memberikan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh manusia karena pandemic virus corona yang mudah menyebar dari manusia ke manusia dan bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit hingga pada kematian. Mengingat virus corona-19 sangat berbahaya, maka pemerintah mengambil langkah-langkah strategis seperti memberikan imbauan tentang memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak (*social distancing*). Imbauan ini sangat penting untuk diterapkan dengan tujuan mencegah penyebaran virus corona-19. Berikut wawancara dengan pemerintah di Kota Palu:

“Kami sebagai pemerintah sangat gencar menyampaikan pesan-pesan untuk mencegah virus corona 19 kepada masyarakat di Kota Palu, bukan hanya pesan tertulis tetapi juga dengan Tindakan langsung, menyampaikan secara langsung hingga pada pembubaran paksa pada mereka-mereka yang suka berkerumun. Tapi ternyata imbauan kami maish tetap dilanggar oleh sebagian besar masyarakat.” (Wawancara, 25 Januari 2021)

Pesan-pesan persuasif yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan cara mencegah penyebaran COVID-19, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak mampu menekan peningkatan jumlah pasien COVID-19, karena masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi imbauan dari pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data secara nasional tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia yaitu pasien positif 977.474, sembuh 791.059 dan 27.664 meninggal, (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Selanjutnya pada tingkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 23 Januari 2021 bahwa konfirmasi pasien positif 6411, sembuh 4071 dan meninggal 166 orang. Khusus untuk wilayah Kota Palu bahwa pasien yang terkonfirmasi positif yaitu 1930 orang, (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021).

Peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Sulawesi Tengah hingga menjadikan beberapa di daerah tersebut masuk dalam zona merah, seperti Kota Palu, maka pemerintah kemudian menerapkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini diharapkan bisa menekan penambahan jumlah pasien corona. Berikut penyampaian dari pemerintah di Kota Palu:

“Aturan selanjutnya yang kami terapkan ialah berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai dari sekolah, kampus, pasar, mall, hingga pada café-café yang berada di Kota Palu dan lain-lain. Kebijakan ini pada dasarnya tidak boleh untuk dilanggar, karena dampaknya jika dilanggar akan banyak masyarakat yang terjangkit virius corona 19.” (Wawancara, 25 Januari 2021)

Menerapkan kebijakan tentang PSBB merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di Kota Palu Sulawesi Tengah. Apabila daerah sehat, maka segala aktivitas masyarakat tentunya berjalan dengan normal. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease* (Covid-19). Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB, diantaranya aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di

fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum (Kemenkes RI, 2020). Namun, kenyataannya masyarakat banyak yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk bisa memutus mata rantai covid-19. Pada dasarnya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah harus bisa bekerja sama dalam mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang bisa mengakibatkan kematian. Penyampaian dari perawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu, menyatakan bahwa:

“Intinya masyarakat harus bisa diajak bekerja sama dalam memerangi COVID-19 ini, karena kalau tidak ada kerja sama yang baik, maka akan berdampak ke semua elemen masyarakat, khususnya juga ke tenaga medis, karena rumah sakit menjadi full, terus kita juga akan kewalahan sebab rasio antara pasien dan tenaga medis itu beda jauh banyaknya, dan juga hingga saat ini perawat hingga dokter sudah banyak yang tertular dan meninggal karena COVID-19. Namun sebagai perawat kami terus berjuang untuk menyetatkan Indonesia.” (Wawancara, 27 Januari 2021)

Wabah covid-19 ini tidak hanya meresahkan masyarakat saja, tetapi pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak penanganan covid-19 ini. Peran tenaga kesehatan dalam mas covid-19 yaitu melakukan koordinasi lintas program di Puskesmas/ Fasilitas kesehatan dalam menentukan langkah-langkah menghadapi pandemic covid-19, melakukan analisis data dan mengidentifikasi kelompok sasaran berisiko yang memerlukan tindak lanjut, melakukan koordinasi kader, RT/RW/Kepala Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat setempat terkait sasaran kelompok berisiko dan modifikasi pelayanan sesuai kondisi wilayah, serta melakukan sosialisasi terintegrasi dengan

lintas program lain kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran covid-19 (Kemenkes, 2020). Dalam hal ini, Langkah-langkah dalam menyikapi pandemi ini berdampak langsung dalam hal pengembangan kompetensi SDM, (Putri, 2020: 707-708)

Pengendalian wabah COVID-19 di Indonesia bukan hanya dilihat dari rumah sakit yang memadai serta SDM yang berkualitas, tetapi yang harus diperhatikan untuk menghadapi COVID-19 ini yaitu sistem kesehatan mulai dari pemberian layanan kesehatan, tenaga kerja, sistem informasi, akses ke obat-obatan, pembiayaan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan tata kelola layanan kesehatan, (Putri, 2020: 708). Begitu banyak hal-hal yang harus diperhatikan dengan baik dalam mengendalikan wabah COVID-19 yang semakin hari, semakin bertambah hamper di seluruh pelosok Indonesia, seperti di Kota Palu. Hingga saat ini, langkah selanjutnya yang kemudian diambil oleh pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan yaitu kebijakan tentang penyuntikan vaksin corona 19 kepada seluruh elemen masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tentunya telah didukung dengan berbagai pertimbangan yang matang bahwa pemerintah telah melakukan uji klinik vaksin hingga ke fase III dengan melibatkan PT Bio Farma dan menetapkan bahwa vaksin yang telah diuji tersebut aman untuk tubuh manusia berdasarkan pengawasan dari Badan POM, (Yuningsih, 2020: 16)

Mahasiswa berpendapat:

“Kami sebagai mahasiswa sangat siap untuk di vaksin, karena saya sudah menyaksikan juga diberbagai media dan artikel-artikel yang dituliskan bahwa vaksin yang dipriduksi pemeirntah telah aman untuk disuntikan ke dalam tubuh manusia. Menurut kami, kebijakan pemerintah ini sangat baik demi menekan penyebaran virus corona 19 ini.” (Wawancara, 27 Januari 2021)

Kebijakan penyuntikan vaksin corona 19 disambut dengan baik oleh sivitas akademika seperti mahasiswa di Kota Palu. Persepsi positif yang mereka sampaikan disebabkan telah memiliki berbagai data valid yang didapatkan melalui media tentang keamanan vaksin corona 19. Namun, meskipun demikian tidak semua masyarakat mendapatkan informasi yang sama, olehnya itu pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan promosi agar banyak masyarakat yang paham dan sadar tentang dampak positif dari penyuntikan vaksin corona 19.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam rencana dilakukannya vaksinasi massal pada tahun 2021. *Pertama*, perlu dilakukannya sosialisasi yang masif tentang pentingnya vaksinasi sebagai upaya yang paling efektif dalam mencegah penyakit dan bahayanya pandemi Covid-19 dalam berbagai perspektif kehidupan. Sosialisasi juga melibatkan semua media massa dan media sosial karena banyak media yang keliru memberitakan vaksin dan obat Covid-19 adalah sama padahal keduanya berbeda. Vaksin bertujuan mencegah penyakit sedangkan obat bertujuan menyembuhkan ketika terjangkit penyakit. Keterlibatan media sosial menjadi penting mengingat masyarakat lebih terpapar media sosial dibanding berita di televisi maupun koran. *Kedua*, pendekatan terhadap kelompok antivaksin. Seperti halnya pada kegiatan imunisasi beberapa penyakit menular sebelumnya yang banyak mendatangkan pro kontra kehalalan dan banyak menimbulkan kelompok-kelompok antivaksin, vaksinasi Covid-19 perlu melibatkan *stakeholder* untuk melakukan pendekatan kepada kelompok antivaksin melalui strategi promosi kesehatan seperti upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, (Yuningsih, 2020: 16)

Pemerintah Kota Palu, berpendapat:

“Kami sudah berupaya untuk mensosialisasikan dan mempromosikan tentang kebijakan penyuntukan vaksin corona 19 ini

kepada masyarakat, misalnya mewajibkan para tenaga medis untuk mempromosikan melalui profil akun FB mereka, dalam setiap kesempatan menyampaikan juga kepada masyarakat melalui komunikasi langsung, dan para tenaga medis juga sangat sering mempromosikan ke masyarakat umum, jadi kaya informasinya mulut ke mulut (word of mouth).” (Wawancara, 25 Januari 2021)

Memanfaatkan teknologi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan tenaga media untuk bisa menyosialisasikan dan mempromosikan kebijakan penyuntikan vaksin corona 19 kepada seluruh elemen masyarakat. Tujuannya untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan pentingnya vaksin untuk bisa mencegah penyebaran virus corona 19 dari manusia ke manusia lainnya.

Selanjutnya, faktor lain yang perlu diperhatikan dalam vaksinasi massal yaitu factor *ketiga*, vaksinasi massal didukung oleh sumber daya yang kuat seperti adanya kepastian peraturan; koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; sumber pembiayaan termasuk kebijakan menggratiskan vaksinasi massal atau mengharuskan masyarakat membayar vaksin; pelatihan tenaga medis/tenaga kesehatan; sarana dan prasarana yang mendukung *supply chain management* vaksin yang optimal mulai dari proses produksi, distribusi hingga vaksin disuntikan ke masyarakat. *Keempat*, adanya pengawasan pelaksanaan vaksinasi massal di seluruh daerah seperti pengawasan terhadap penyediaan vaksin, kualitas vaksin, penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan akibat pemberian vaksin. Hal ini dikarenakan efek vaksin yang ditimbulkan berbeda-beda bagi setiap orang. Pengawasan juga dilakukan terhadap adanya kemungkinan kasus vaksin palsu dan

vaksin rusak karena proses penyimpanan dan distribusi, (Yuningsih, 2020: 16-17)

Kebijakan pemerintah tentang vaksin COVID-19 sangat perlu untuk dilakukan pengawasan yang baik, karena banyak beredar kabar yang membuat masyarakat resah bahwa akan bermunculan vaksin palsu yang nantinya bisa merugikan kesehatan manusia. Masyarakat yang terkena dampak kebohongan informasi ini mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Berikut penyampaian dari masyarakat biasa:

“Kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, awalnya tidak setuju dengan penyuntikan vaksin ini, karena beredar kabar bahwa vaksinnnya palsu dan tentunya akan mengakibatkan kematian. Untung saja banyak tenaga medis dan pemerintah yang memberikan kami pemahaman dengan baik, jadi menurut kami bahwa kami siap juga untuk divaksin demi Kota Palu dan Indonesia yang sehat, terbebas dari COVID-19.” (Wawancara, 25 Januari 2021)

Pesan positif yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan vaksin COVID-19 didapatkan melalui stimulus yang berada dari luar individunya seperti berita dari media massa, media sosial dan dari orang lain (pemerintah dan tenaga medis). Pesan ini merupakan bentuk persepsi yang diterima dari panca indera. Menurut Permadi, dkk (2018: 522), persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya yang diperoleh dengan penginderaan, sehingga memunculkan interpretasi dari stimulus yang mengenainya, sehingga memunculkan makna tentang objek tersebut. Pada intinya persepsi dimulai dari stimuli dan kemudian diinterpretasikan. Input sensorik yang diterima oleh manusia merupakan data awal (mentah) yang kemudian diproses dan diolah kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi.

Dalam hal ini, data awal mentah itu merupakan stimulus yang berkaitan dengan informasi tentang kebijakan penyuntikan vaksin COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan sejahtera. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya diperuntukan untuk seluruh warga Indonesia seperti pada masyarakat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan konsep tentang kebijakan oleh Marzali (2012:19) mengemukakan bahwa “Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran (kelompok target)”.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah tentang vaksin COVID-19 bertujuan untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh dan menghambat penyebaran virus dari manusia ke manusia lainnya. Kebijakan ini merupakan stimulus yang dapat menghasilkan persepsi dari masyarakat sebagai target sasaran. Berdasarkan persepsi masyarakat di Kota Palu, Sulawesi Tengah bahwa mereka merespon dengan baik kebijakan penyuntikan vaksin COVID-19 demi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam proses penerapan kebijakan tentang vaksin COVID-19, di mana dibutuhkan sosialisasi dan promosi yang baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat vaksin sehingga masyarakat bisa memberikan respon positif sebagai bentuk proses komunikasi yang efektif.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai penulis, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, tenaga medis dan masyarakat Kota Palu yang telah bersedia memberikan data informasi terkait dengan persepsi dari

kebijakan pemerintah tentang vaksin COVID-19.

Referensi

- Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45–67.
- Afifah, Dian Fitriani & Neneng. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.2 No.2, Oktober 2016.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta Amri
- Aldilal, Achmad Akbar Sanjaya, Nur Akbar, Muhammad Ramlan Febriansyah. Pemberitaan dan Opini Publik tentang Kedatangan Tenaga Kerja China Pada Masa Pandemi COVID-19 di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Komunikasi* P-ISSN 1693-3028; E-ISSN 2407-8220. Volume 18, No. 3 December 2020, 280-291 DOI: <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3789>
- Eikenberry, S. E., Mancuso, M., Iboi, E., Phan, T., Eikenberry, K., Kuang, Y., Kostelich, E., & Gumel, A. B. (2020). To mask or not to mask: Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic. *Infectious Disease Modelling*, 5, 293–308. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2020.04.001>
- Hidayat, Dasrun, Leili Kurnia Gustini, Megawati Puspa Dias. Digital Media Relations Pendekatan Public Relations dalam Menyosialisasikan Social Distancing di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi* P-ISSN 1693-3028; E-ISSN 2407-8220. Volume 18, No. 3 December 2020, 257-268 DOI: <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3575>

- Kaddi, Sitti Murni, Puji & Donal. Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Coronavirus Disease 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 18 Nomor 1, April 2020, halaman 63-74
- Kementrian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 1-136.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>
- Marzali, Amri. 2008. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana
- Mona, Nailul. Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Volume 2 No.2, Januari-Juni 2020
- Saldaña, Johnny. *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (Sage, 2015);
- Saldaña, Johnny and Matt Omasta, *Qualitative Research: Analyzing Life* (Sage Publications, 2016).
- Permadi, Endang & Sabarudin. Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman Terhadap Kasus Penistaan Agama Basuki Cahya Purnama Yang Tersebar Melalui Media Sosial Youtube. *e-Journal Ilmu Komunikasi*, 6, (3) 2018: 520-532
- Prasetijo, Ristiyanti. 2005. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sari, Indah Pitaloka & Sriwidodo. Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19. *Majalah Farmasetika*, 5 (5) 2020, 204-217
<https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i5.28082>
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yuningsih, Rahmi. 2020. Uji Klinik Coronavac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia. *Jurnal: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Vol. XII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2020.